



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungai Raya, Desember 2018
Sekretaris,

Anto Sapati
NIP.196005191988071004





DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	Iv
Pernyataan Tanggung Jawab	V
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara	44
1. Pendahuluan	44
2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara	46
3. Pendekatan Penyusunan Laporan	47
4. Ringkasan Barang Milik Negara	48
5. Informasi Lainnya	54
VII. Daftar Laporan dan pendukung CaLK	
BAR SAIBA	
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Neraca Percobaan	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Surat persetujuan pembukaan rekening	



Daftar Rekening Komisi Pemilihan Umum Kab.Kubu
Rekening Koran Komisi Pemilihan Umum Kab.Kubu Raya
SSBP Pengembalian Sisa UP dan TUP TA 2018
NPHD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018
SP2HL DAN SPHL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
BAR SIMAK BMN
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Neraca BMN
BAR Rekon Internal
BA Stok Opname BMN
Laporan Persediaan
Neraca Persediaan
BA Stok Opname Persediaan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Raya, Desember 2018

Sekretaris,

Anusapoli

NIP.196605151988071004





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp.42.000.753.416,- atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.44.217.791.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.084.617.922,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.3.343.692.480,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.4.084.617.922;

Nilai Ekuitas sebesar Rp. 4.084.617.922,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0.-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.41.159.459.873,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 41.159.459.873), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO



sebesar Rp.41.209.309.873,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.5.365.972.476,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.41.159.459.873,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.39.878.105.319,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.4.084.617.922,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		% thd Angg	31 DESEMBER 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	0,00	29.550.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	29.550.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1.965.808.000	1.941.575.856	98,77	1.845.382.763
Belanja Barang	B.4	41.477.937.000	39.449.817.860	95,11	2.872.135.232
		43.443.745.000	41.391.393.716		4.717.517.995
BELANJA MODAL	B.5				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.1	774.046.000	609.359.700	78,72	255.932.765
Jumlah Belanja		774.046.000	609.359.700	78,72	255.932.765
JUMLAH BELANJA		44.217.791.000	42.000.753.416	94,99	4.973.450.760



II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	138.886.932
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	3.944.259.098
Persediaan	C.3	3.293.842.480	1.149.126.500
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.4	49.850.000	-
Jumlah Aset Lancar		3.343.692.480	5.232.272.530
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.5	1.786.206.015	1.183.951.315
Aset Tetap Lainnya	C.6	11.879.880	11.879.880
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(1.057.160.453)	(923.244.317)
Jumlah Aset Tetap		740.925.442	272.586.878
JUMLAH ASET		4.084.617.922	5.504.859.408
KEWAJIBAN			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			-
Uang Muka dari KPPN		-	138.886.932
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	4.084.617.922	1.299.884.918
JUMLAH EKUITAS		4.084.617.922	1.299.884.918
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.084.617.922	1.299.884.918

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DES 2018	31 DES 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.941.575.856	1.845.382.763
Beban Persediaan	D.3	4.918.260.563	112.218.866
Beban barang dan Jasa	D.4	31.300.591.159	2.153.197.622
Beban Pemeliharaan	D.5	126.398.882	64.614.278
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.738.717.277	542.104.466
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	133.916.136	118.501.827
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		41.159.459.873	4.836.019.822
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(41.159.459.873)	(4.836.019.822)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	29.550.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	17.396.611
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	12.153.389
SURPLUS/(DEFISIT)PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	12.156
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	12.156
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	12,165,545
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(41.159.459.873)	(4.836.019.822)

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	5.365.972.476	1.299.884.918
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(41.159.459.873)	(4.823.854.277)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MEGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	1.781.977
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	1.781.977
Koreksi Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	39.878.105.319	8.888.159.858
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.281.354.554)	4.066.087.558
EKUITAS AKHIR	E5	4.084.617.922	5.365.972.476

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

MISI

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melakukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.



2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja, sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui



strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP)



layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6)
 - d. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup



*Laporan
Keuangan*

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset



tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya



ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan



menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke tiga tidak dilakukan pelunasan	100%



	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 -

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional



pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a . Tanah;
 - b . Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ; dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan .
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59 / KMK. 06 / 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
---------------------	--------------



Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, jaringan dan irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya (alat musik modern)	4 Tahun

Piutang Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud



Kolompok Aset Tak Berwujud	Masa manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan .

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal . Hal ini disebabkan karena :

- Adanya Penambahan Detail berupa Belanja Modal di Kegiatan Layanan Teknologi Informasi Pemilu (3357.035)
- Adanya Penambahan Pagu di Kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (3357.039);
- Adanya penambahan Pagu di Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040);
- Adanya penambahan Pagu di Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364);

Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.923.557.000	1.965.808.000
Pelanja Barang	12.712.338.000	13.652.325.000
Belanja Modal	62.236.000	774.046.000
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Pegawai		
Pelanja Barang		27.825.612.000
Belanja Modal		
JUMLAH BELANJA	14.698.131.000	44.217.791.000

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,-. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-



Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah		-	-

Tidak ada realisasi pendapatan negara bukan pajak pada Tahun 2018.

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan Tahun 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	29.550.000	0,00
		-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Realisasi Belanja
Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Kubu Raya pada TA 2018 adalah sebesar Rp.42.000.753.416,- atau 94,99% dari anggaran belanja sebesar Rp.44.217.791.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja KPU Kabupaten Kubu Raya TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

URAIAN	2018		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.965.808.000	1.941.575.856	98,77
Belanja Barang	13.652.325.000	11.702.442.540	85,72
Belanja Modal	774.046.000	609.359.700	78,72
Total Belanja Kotor	16.392.179.000	14.253.378.096	86,95
Pengembalian Belanja	86.447.221	5.896.000	6,8203465
Belanja Netto	16.305.731.779	14.247.482.096	87,38
PINJAMAN DAN HIBAH			
Belanja Barang	27.825.612.000	27.747.375.320	99,718832
Belanja Netto	44.217.791.000	42.000.753.416	94,99



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 91,67 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Untuk realisasi belanja pegawai pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 12 % dibandingkan Tahun lalu, hal ini disebabkan pada Tahun 2018 adanya revisi penambahan pagu untuk belanja pegawai;
2. Untuk realisasi belanja barang, pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 56 % dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 adanya penambahan anggaran untuk keperluan Pemilihan tahun 2019 dan adanya penambahan anggaran dari Hibah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.
3. Untuk realisasi belanja modal, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 17% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada karena adanya penambahan anggaran belanja modal di Tahun 2018 untuk keperluan Pemilihan Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.941.575.856	1.845.382.763	5,21
Belanja Barang	39.449.817.860	2.872.135.232	1.273,54
Belanja Modal	609.359.700	255.932.765	138,09
Jumlah	42.000.753.416	4.973.450.760	744,50



Belanja Pegawai
Rp.1.941.575.856,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.941.575.856,- dan Rp. 1.845.382.763,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 11.63 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena 2018 adanya penambahan pagu untuk untuk belanja pegawai. Pengembalian Belanja Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan November 2018 An. Muhammad Said, A.Md, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Desember 2018 An. Muhammad Said, A.Md

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	509.144.620	524.820.031	(2,99)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.432.431.236	1.320.274.732	8,49
Belanja Honorarium		-	-
Belanja Lembur	-	288.000	-
Jumlah Belanja Kotor	1.941.575.856	1.851.278.763	4,88
Pengembalian Belanja Pegawai	272.950	(5.896.000)	
Jumlah Belanja	1.941.302.906	1.845.382.763	5,20



Belanja Barang

Rp.39.449.817.860,

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.39.449.817.860,- dan Rp. 901.068.830,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 56% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan karena pada Tahun 2018 adanya penambahan belanja barang untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

Pengembalian Belanja Barang merupakan pengembalian Belanja honorarium Kelompok Kerja Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Orang, Pengembalian Kelebihan atas Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon di RSUD Soedarso, Pengembalian Belanja Barang Kelengkapan Tungsura Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	276.280.233	248.983.600	10,96
Belanja Barang Non Operasional	29.436.033.434	1.714.489.380	1.616,90
Belanja Jasa	1.640.390.492	189.724.642	764,62
Belanja Pemeliharaan	126.398.882	176.833.144	(28,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.738.717.277	542.104.466	405,20
Belanja Barang Persediaan	5.318.171.813		
Jumlah Belanja Kotor	39.535.992.131	2.872.135.232	1.276,54
Pengembalian Belanja	86.174.271	-	
Jumlah Belanja	39.449.817.860	2.872.135.232	1.273,54

Belanja Modal

Rp.609.359.700,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing Rp. 241.712.000,- dan Rp.174.238.265,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,63 % persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat anggaran belanja modal untuk keperluan Pemilihan Tahun 2019 dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, yaitu pengadaan Laptop, Printer, Scanner, PC, Kuris Besi/Metal, Meja Kayu, Finger Print, Maket di beberapa kegiatan.



Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	609.359.700	255.932.765	250
Jumlah Belanja Kotor	609.359.700	255.932.765	250
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	609.359.700	255.932.765	250

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

Rp.609.359.700,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp. 609.359.700,- mengalami kenaikan sebesar 6,63% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat anggaran belanja modal, yaitu pengadaan Laptop, Printer, AC,scanner, di beberapa kegiatan.



Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Lemari besi/Metal	3.350.000	2.400.000	39,58
Meja Kerja Kayu	5.530.000	3.200.000	72,81
Komputer Unit	128.168.000	9.968.000	1185,79
Kursi Dorong	0	1.350.000	-100,00
Kursi Besi/Metal	7.105.000	-	100,00
Peralatan Personal Komputer (Printer)	23.442.000	48.020.840	-51,18
Personal Komputer	22.334.000	122.998.055	-81,84
Sacnner	66.878.000	32.126.740	108,17
Alat Pendingin	11.788.000	14.400.000	-18,14
Alat Rumah Tangga Lainnya (Handycam)	0	16.619.130	-100,00
Alat Kantor Lainnya (Teralis)	0	4.850.000	-100,00
Finger Print	3.300.000	-	100,00
Panel Pameran	20.029.000	-	100,00
Maket/Miniatur/Replika	2.800.000	-	100,00
Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	259.195.700	-	100,00
Genset	13.800.000	-	100,00
Kipas Angin	2.650.000	-	100,00
Sound System	14.635.000	-	100,00
Dispenser	3.030.000	-	100,00
Televisi	6.800.000	-	100,00
Coffe Maker	1.525.000	-	100,00
Karpet	13.000.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	609.359.700	255.932.765	100,00
Pengembalian	-	-	100,00
Jumlah Belanja	609.359.700	255.932.765	0,00



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas DiBendahara
Pengeluaran Rp.0,-

C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp 138.886.932,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum di catat dikarena penyetoran ke Kas Negara dilakukan di awal tahun berikutnya. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel.10
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan	TH 2018	TH 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	138.886.932
Jumlah	-	138.886.932

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 3.944.259.0980,-

Kas Lainnya Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel.11

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	3.944.259.098
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	3.944.259.098

Persediaan
Rp .3.293.842.480

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 3.293.842.480 dan Rp 1.149.126.500,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan



kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.12

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	502.812	502.812
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	3.293.339.668	1.148.623.688
Jumlah	3.293.842.480	1.149.126.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp 502.812 berada dalam kondisi baik.

Beban di Bayar di Muka
Rp. 49.850.000,-

C.4 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.49.850.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel.13

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2017 dan 2018

Jenis	TH 2017	TH 2018
Pembayaran Sewa Gudang	-	49.850.000
Jumlah	-	49.850.000

Peralatan dan Mesin
Rp 1.786.206.015

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 1.786.206.015 dan Rp 1.183.951.315,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel.14
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.183.951.315
Mutasi tambah:	
Pembelian	604.609.700
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	1.788.561.015
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-1.057.160.453
Nilai Buku per 31 Desember 2018	731.400.562

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian Kursi Besi/Metal, Lemari Besi/Metal dan Meja Kayu senilai Rp 15.985.000;
- Pembelian *Finger Printer Time and Attendance Acces Control system* berupa Absen Finger Print senilai Rp. 3.300.000
- Pembelian *Personal Computer* berupa Laptop senilai Rp. 14.605.000.
- Pembelian *Personal Computer* berupa Komputer (PC. Unit) senilai Rp. 26.000.000.
- Pembelian Maket/Miniatur/Replika senilai 2.800.000
- Pembelian Panel Pameran senilai Rp. 17.229.000.
- Pembelian Komputer (PC. Unit), Scanner, Printer senilai Rp. 171.468.000,-
- Pembelian Scanner dan Laptop senilai Rp. 12.699.000,-
- Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya berupa Mobil senilai Rp. 259.195.700,-
- Pembelian Peralatan Komputer berupa Printer senilai Rp. 24.300.000,-
- Pembelian Panel Pameran senilai Rp. 2.800.000,-
- Pembelian Keperluan Kantor, Keperluan Rumah Pintar Pemilu dan Aksesoris Mobil seharga Rp. 54.228.000,-

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.11.879.880,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 11.879.880 dan Rp 11.879.880. Aset tetap tersebut berupa barang teralis. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel.15

Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan Tahun 2017

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	11.879.880
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2018	11.879.880
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	11.879.880

Akumulasi Penyusutan
Aset tetap
(Rp.1.057.160.453-)

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp 1.057.160.453) dan (Rp 923.244.317). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.16

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.786.206.015	-1.057.180.453	2.843.386.468
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	11.879.880	0	11.879.880
	Akumulasi Penyusutan	1.798.085.895	-1.057.180.453	2.855.266.348

Ekuitas
Rp.4.034.767.922,-

C.8 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.4.034.767.922,- dan Rp.5.365.972.476,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp.0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2018 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel.17
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak ada pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2018.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.1. 941.575.856,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.941.575.856,- dan Rp. 1.845.382.763,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel.18
Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	509.144.620	524.820.031	-3
Beban Tunjangan-tunjangan	1.432.431.236	1.320.274.732	8
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	
Beban Lembur	-	288.000	
Jumlah	1.941.575.856	1.845.382.763	5

Beban Persediaan
Rp.4.918.260.563,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.918.260.563,- dan Rp.112.218.866,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017



adalah sebagai berikut:

Tabel.19

Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.465.779.584	51.233.000	6.664,7
Beban Persediaan bahan baku	1.404.012.979	30.045.866	4.572,9
Beban Persediaan Lainnya	48.468.000	30.940.000	56,7
Jumlah Beban Persediaan	4.918.260.563	112.218.866	4.282,7

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa

Rp.31.350.441.159,

-

Jumlah Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.350.441.159,- dan Rp. 2.153.197.622,- Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.20

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	150.661.233	150.649.600	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	469.000	54.000	7,69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116.170.000	89.300.000	0,30
Beban Honor Operasional Lainnya	8.980.000	8.980.000	0,00
Beban Bahan	2.366.584.700	240.778.630	8,83
Beban Honor Output Kegiatan	21.816.150.000	622.010.000	34,07
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.243.930.734	851.700.750	0,00
Beban Langganan Listrik	28.510.134	34.470.022	-17,29
Beban Langganan Telepon	12.158.358	5.615.870	1,16
Beban Langganan Air	5.000.000	2.250.000	1,22
Beban Sewa	1.148.347.000	132.188.750	7,69
Beban Jasa Profesi	20.800.000	7.000.000	1,97
Beban Jasa Lainnya	425.575.000	3.300.000	127,96
Beban Aset Ekstrakomtabel	7.105.000	0	0,00
Jumlah	31.350.441.159	2.148.297.622	1.881,80



Beban
Pemeliharaan
Rp.126.398.882,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.126.398.882,- dan Rp. 64.614.278,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.21
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.559.778	-	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.499.000	2.185.500	-31,41
Beban Persediaan Suku Cadang	31.559.500	44.076.000	-28,40
Jumlah	64.618.278	46.261.500	-59,81

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.2.738.717.277,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.738.717.277,- dan Rp. 542.104.466,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.22
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.160.542.777	422.635.666	411,21
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.635.000	50.289.000	129,94
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	421.573.000	53.575.000	686,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.966.500	15.604.800	162,52
Jumlah	2.738.717.277	542.104.466	405,20

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp.0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun



2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.23

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.24

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 133.916.136,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.133.916.136,- dan Rp. 118.501.827- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel.25
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.916.136	118.501.827	13,01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	133.916.136	118.501.827	13,01
			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain		-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.916.136	118.501.827	13,01

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.26
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	-	-
Beban Lain - Lain	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Lain-lain
Rp.0,-

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk tahun Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut



Tabel.27
Rincian Beban Lain-lain Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.0,-

D.12 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel .28
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	29.550.000	0.00
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	29.550.000	0.00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	17.396.611	0.00
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	17.396.611	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-	0.00

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.5.365.972.476,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.5.365.972.476,- dan Rp. 1.299.884.918,-

Defisit LO
Rp. 41.209.309.873

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.41.209.309.873,- dan Rp. 4.823.854.277,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp.0,-

E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.1.781.977. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel.30
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non revaluasi	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp.8.888.159.858-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 8.888.159.858 dan Rp 2.593.622.186. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel.31
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TH 2018
Ditagihka Ke Entitas Lain	14.175.143.825
Diterima Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1.821.611.001
Pengesahan Hibah Langsung	33.703.280.550
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(9.821.930.057)
Jumlah	39.878.105.319



Ekuitas Akhir

Rp 4.034.767.922,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.034.767.922,- dan Rp. 5.365.972.476,-



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Selama TA 2018 (periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan 11 (sebelas) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi ke 1 (satu) tanggal 29 Januari 2018 tidak ada perubahan tetap mengacu pada RKA awal;
- b. Revisi ke 2 (dua) tanggal 21 Februari 2018 perubahan lokasi yang semula Kota Pontianak menjadi Kabupaten Kubu Raya;
- c. Revisi ke 3 (tiga) tanggal 26 Maret 2018, penambahan detail di kegiatan 3357.035 (Layanan Teknologi Informasi), Penambahan Pagu di kegiatan 3357.039 (Pembentukan Badan Penyelenggara Badan Adhoc), Pengurangan pagu untuk 3357.040 (Panitia Pemilihan Kecamatan), Penambahan detail di kegiatan 3364.034 (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW)
- d. Revisi ke 4 (empat) tanggal 12 Juli 2018 adanya Penambahan Pagu untuk kegiatan 3356.015 (Sarana dan Prasarana Pemilu) dan Perubahan Lokasi ke Kota Pontianak;
- e. Revisi ke 5 (lima) tanggal 15 Agustus 2018 penambahan pagu di kegiatan 3356.015 (Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu), Penambahan Pagu di kegiatan 3356.015 (Sarana Prasarana Keperluan Pemilu), Penambahan Pagu di Kegiatan 3360.994 (Penyelenggaraan Operational dan Pemeliharaan Perkantoran), Penambahan Pagu di kegiatan 3364.034 (Tahapan Pemilihan).
- f. Revisi ke 6 (enam) tanggal 02 Oktober 2018, Penambahan Transport di kegiatan 3357.032 (Penyusunan Anggaran Pemilu), adanya penambahan Belanja Bahan, Belanja Barang Konsumsi, Belanja Barang Perjalanan Dinas di kegiatan 3357.039(Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc), adanya penambahan Belanja Bahan, Belanja Barang Konsumsi, Belanja Barang Perjalanan Dinas di kegiatan 3357.040(Panitia Pemilihan Kecamatan), penambahan Belanja Bahan, Belanja Barang Konsumsi, Belanja Barang Perjalanan Dinas di kegiatan 3357.041(Panitia



- Pemungutan Suara), Penambahan Pagu untuk Pengadaan Kendaraan Roda Empat di kegiatan 3362.004 (Penyelenggara Dukungan Sarana dan Prasarana), Penambahan Belanja Perjalanan Dinas di Kegiatan 3363.020 (Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu), Penambahan Belanja Bahan di kegiatan 3364.047 (Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD).
- g. Revisi ke 7 (tujuh) tanggal 15 Oktober 2018, Penambahan Belanja Bahan di Kegiatan 3356.015 (Sarana dan Prasarana Pemilu), Penambahan biaya Perjalanan biasa dan Biaya Koordinasi ke Dukcapil, Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota di kegiatan 3357.034 (Pemutakhiran Data Pemilih), Penambahan Belanja Langganan Air di kegiatan 3360.994 (Layanan Perkantoran), Penambahan Belanja Bahan di 3364.052 (Pembentukan Rumah Pintar Pemilu), Penambahan Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Perjalanan Biasa di kegiatan 3364.052 (Pendidikan Pemilih Pemilu).
- h. Revisi ke 8 (delapan) tanggal 13 November 2018, terjadi pengurangan pagu di beberapa kegiatan Pelayana Perkantoran (3364.994) diantaranya Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri, Belanja Tunjangan Anak PNS, selain itu penambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa di 3356.014 (Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi), Penambahan Belanja Bahan untuk 3356.015 (Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu), Penambahan Belanja Bahan dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota untuk 3357.034 (Pemutakhiran Data Pemilih), Penambahan belanja bahan, Honor Output Kegiatan, Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Biasa, di kegiatan 3357.040 dan 3357.041.
- i. Revisi ke 9 (sembilan) tanggal 16 November 2018, Penambahan untuk Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri, Belanja Tunjangan PPh PNS, uang makan, Belanja tunjangan umum PNS di kegiatan 3355.994, Penambahan perjalanan dinas biasa di 3356.015 (Sarana dan Prasarana Pemilu), Belanja ATK di 3357.034 (Pemutakhiran Data Pemilih), Penambahan Perjalanan Dinas Biasa di 3357.040 (Panitia Pemilih Kecamatan), Penambahan ATK dan Konsumsi, Perjalanan dinas biasa, di 3357.041 (Panitia Pemungutan Suara), Penambahan biaya Langganan Listrik, di 3360.994 (Layanan Perkantoran), Penambahan



rincian untuk perjalanan dinas biasa di 3364.043(Calon Anggota DPR,DPRD,Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu), Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Biasa,ATK, di 3364.052 (Pendidikan Pemilih Pemilu).

- j. Revisi ke 10 (Sepuluh) tanggal 29 November 2018, Penambahan Uang Kehormatan Komisioner KPU dan Tukin Sekretariat di 3355.994(Layana Perkantoran),Penambahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi di kegiatan 3356.015, Penambahan Belanja Modal di kegiatan 3362.004(Kendaraan Bermotor).
- k. Revisi ke 11 (Sebelas) tanggal 14 Febuari 2019, Pengurangan pagu di beberapa kegiatan Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, dan Pengurangan Pagu di beberapa akun dikegiatan 3364.034 (Tahapan Pemilhan)

F.2.1 Setiap akhir bulan KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Jasa Giro dari Bank Mandiri (atas rekening Bpg.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya No Rek. 146.00.0569344-0), namun jasa giro tersebut langsung disetor oleh pihak Bank Mandiri ke rekening Bendahara Umum Negara.

F.2.2 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya masih memiliki Jurnal tidak Lazim dalam erekon merupakan Pengakuan Aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum perolehan harga per satuan peralatan dan mesin nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), yaitu berupa pembelian kursi besi/metal sebanyak 20 buah, adapun memo penyesuain terlampir.

F.2.3 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya memiliki Belanja dibayar dimuka sebesar 49.850.000 merupakan Sewa Gudang dari 10 September 2018 sampai dengan 10 April 2019, Memo Penyesuaian terlampir.

F.2.3 Sesuai NPHD antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor Hibah:03/NPHD/SETDA-PEM/2017 Nomor Referensi: 42/PR.07-SPj/6112/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 17 Jui 2017 senilai Rp39.700.300.550,-, Kode Register 2V5PF65A.

F.2.4 KPU Kabupaten Kubu Raya menerima transfer Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2017 sebesar Rp5.997.020.000,- dan telah melakukan SP2HL dan telah mengajukan SP2HL ke KPPN Pontianak dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017, sebanyak 4 kali yaitu antara lain :

- Nomor SP2HL 00155T/670742/2017 tanggal 19 Oktober 2017,
Nomor SPHL 170420000000016 tanggal 24 Oktober 2017



sebesar 264.457.999.

- Nomor SP2HL 00182T/670742/2017 tanggal 20 November 2017, Nomor SPHL 17042500410001 tanggal 20 November 2017 sebesar 368.081.775.
- Nomor SP2HL 00214T/670742/2017 tanggal 14 Desember 2017, Nomor SPHL 170420500410002 tanggal 14 Desember 2017 sebesar 536.508.181.
- Nomor SP2HL 00223T/670742/2017 tanggal 31 Desember 2017, Nomor SPHL 170420500410003 tanggal 31 Desember 2017 sebesar 536.508.181.
- Total dana Hibah yang sudah di SP2HL sebesar yaitu sebesar : 2.052.760.902

F.2.5 KPU Kabupaten Kubu Raya menerima transfer Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2018 sebesar Rp33.703.280.550,- dan sisa dana hibah tahun 2018 sebesar Rp9.821.930.057,- sehingga total dana hibah di tahun 2018 sebesar Rp39.700.300.550,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	Sisa Dana Hibah Tahun 2017	3.944.259.098,-	
2	Dana hibah yang diterima tahun 2018	33.703.280.550,-	
3	Realisasi	27.825.609.591,-	
4	Sisa Saldo Dana Hibah (1+2) – 3	9.821.930.057,-	SP4HL
Berdasarkan Pembukuan			
5	Saldo Buku Per 31 Desember 2018	9.821.930.057,-	
	a. Rekening Koran Rp9.821.213.529,-		
	b. Kas Tunai : Rp716.528,-		

F.2.6 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan SP2HL ke KPPN Pontianak pada tanggal 13 September 2018 sebesar 15.267.048.110 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu



Seratus Sepuluh Rupiah) dengan nomor surat pengesahan No: 00365T/670742/2018 dan pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar 12.558.561.481 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan nomor surat pengesahan No: 00203T/670741/2018.

F.2.7 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan SP4HL ke KPPN Pontianak pada tanggal 1 November 2018 sebesar 9.821.930.057 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan nomor surat Pengesahan No. 00378T/670742/2018.

F.2.8 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah menyetorkan jasa giro bank atas dana hibah yang di simpan pada bank Kalbar Cabang Kubu Raya ke Kas Daerah dengan Nomor : 1150101201.

F.2.9 Berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 pada KPU Kabupaten Kubu Raya Menerima Dana Hibah sebesar Rp3.131.965.125,- dengan realisasi dana sebesar Rp.2.500.844.950 sisa Dana sebesar Rp. 631.120.175 dan sudah ditransfer ke RPL KPU Provinsi Kalimantan Barat.

F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.3.1 Berdasarkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Kubu Raya masih terdapat saldo rekomendasi sebagai berikut :

- Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp11.550.000,-
- Terdapat sebuah Notebook merk Apple dari hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp13.398.000,-
- Dalam menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Kubu Raya sudah menyurati terhadap pihak terkait, adapun Matriks tindaklanjut BPK terlampir.

DIS